

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kita tengah berada di abad neoliberalisme. Di seluruh dunia ini bahkan sesungguhnya setiap manusia yang tinggal di atas muka bumi ini sudah bisa melihat, memahami dan merasakan bagaimana neoliberalisme pada saat ini berjalan. Ada yang menilai positif dan negatif terhadap jalannya neoliberalisme ini.

Ada beberapa pandangan positif diantaranya Milton Friedman bersama Friedrich August Hayek (ekonom dari Austria) menjadi peletak dasar bangunan Neoliberalisme. Hayek mengunggulkan Kapitalisme pasar bebas dengan menempatkan harga sebagai metode untuk mengoptimalkan alokasi modal, kreativitas manusia, dan tenaga kerja. Sementara Friedman berpandangan insentif individual merupakan cara terbaik untuk menggerakkan ekonomi. Menurut Friedman, *Ada satu, dan hanya satu, tanggungjawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber-dayanya untuk aktivitas yang mengabdikan akumulasi laba.*¹

Disini mereka beranggapan Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam

¹ <http://www.jurnal-ekonomi.org/2009/06/22/jejak-neoliberalisme-di-indonesia/>

masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah.

Akan tetapi ada beberapa kalangan yang menyatakan pandangan dengan neoliberalisme yaitu ketidaksetujuan mereka terhadap neoliberalisme, Dwi Condro Triono mengungkapkan bahwa ada ketidakberesan dari tata ekonomi yang sekarang ini berlangsung. Sangat nampak, bahwa wajah ekonomi saat ini terus berjalan menuju kepada dua kutub yang sangat berlawanan. Satu kutub telah membawa mereka yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan kutub yang lain terus menyeret mereka yang miskin menjadi semakin miskin dengan jumlah yang terus membengkak.²

Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu organisasi WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup Indonesia sepanjang 2009 lebih disebabkan oleh negara yang menganut neoliberalisme. Terlebih karena negara sering menjadi boneka dari kepentingan-kepentingan korporasi yang menganut neoliberal. Hal yang serupa menolak adalah PRP (Perhimpunan Rakyat Pekerja) yang menyatakan bahwa Neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat.

² Makalah yang disampaikan Dwi Condro Triono tentang Menghadapi Hegemoni Neoliberalisme di Indonesia

FSPI sebuah organisasi juga menyatakan ketidak setujuan disebutkan bahwa, Sistem neoliberalisme tidak menghasilkan kesempatan kerja dan kesejahteraan untuk semua, malah mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin besar. Kekayaan dipindahkan dari lapisan bawah ke lapisan atas. Kalau kita termasuk golongan 20% orang terkaya di dunia, tentu kita akan dapat keuntungan dari sistem neoliberalisme ini. Tapi kalau kita termasuk golongan 80% orang yang tersisa, kita akan semakin miskin. Selama 20 tahun belakang ini, hampir setiap negara mengalami kesenjangan sosial yang main lebar. Dan Neoliberalisme tidak memperkuat ekonomi negara-negara miskin namun semakin membuatnya miskin. Neoliberalisme mengakibatkan terjeratnya negara miskin dalam hutang luar negeri yang sangat parah. Berkaitan dengan kebijakan neoliberalisme dalam sektor pertanian, FSPI melihat bahwa: Pasar bebas di sektor pertanian menghancurkan keamanan, ketersediaan, keadilan, dan kedaulatan pangan di banyak negara. Indonesia sadar dan tidak sadar, telah dipaksa menanam produk-produk untuk diekspor. Padahal kemampuan sebuah negara untuk menjamin keadilan pangan adalah hak setiap negara yang berdaulat.³

Neoliberalisme yang merupakan pengembalian kepercayaan pada kekuasaan pasar dengan mengacu pada globalisasi. Ada pandangan Barat yang sesungguhnya menolak konsep Neoliberalisme yang berinti pada globalisasi. menurut Stiglitz (2003), merupakan interdependensi yang tidak simetris antar negara, lembaga dan aktornya. Karena itu interdependensi antar Negara yang seperti tersebut lebih menguntungkan negara yang memiliki keunggulan ekonomi dan teknologi. Logika

³ <http://www.jurnal-ekonomi.org/sikap-dan-pandangan-fspi-terhadap-neoliberalisme/>

yang mendasari ekspansi globalisasi gelombang ketiga diturunkan dari ideologi neoliberalisme.

Bekerja melalui regulasi yang dilakukan oleh tiga lembaga multilateral yang oleh Richard Peet (2003) disebut sebagai *The Unholy Trinity* (IMF, Bank Dunia, dan WTO), di bawah tekanan ekspansi globalisasi gelombang ketiga, perlahan-lahan akan tetapi pasti, segala sesuatu yang berharga tidak dapat dipertahankan dari komodifikasi dan komersialisasi sistem ekonomi global: termasuk air, bahan pangan, kesehatan, karya seni, dan ilmu pengetahuan, apalagi teknologi. Semua itu terjadi terutama melalui proses marjinalisasi kekuasaan dan otoritas negara-negara Dunia Ketiga di dalam pengaturan ekonomi nasional mereka. Menurut pengamatan Stiglitz (2003) globalisasi berwajah fundamentalisme pasar yang dalam manifestasinya mengambil bentuk pasar bebas dengan berbagai instrumennya, telah ditolak oleh masyarakat Amerika Serikat dan perumus kebijakan pada masa Pemerintahan Clinton. Namun, globalisasi seperti itulah yang justru di "*paksakan*" kepada negara-negara berkembang. Korban dari kebijakan tersebut sudah berjatuhan karena industri pertanian negara berkembang dan negara-negara Eropa Timur mengalami kemunduran yang amat besar karena tidak mampu bersaing dengan sektor pertanian negara-negara maju yang diproteksi oleh pemerintahnya.⁴

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan neoliberalisme? Neoliberalisme adalah sebuah filosofi yang lahir di akhir abad 20. Neoliberalisme adalah sebuah

⁴ harian Sindo edisi 10 Maret 2007, Indonesia Menghadapi Liberalisasi Pendidikan oleh Prof Dr. Soffian Effendi

kelanjutan dan redefinisi atas liberalisme klasik, yang terpengaruh oleh teori ekonomi klasik. Term Neoliberalisme sebenarnya lebih sering digunakan oleh para pengkritik doktrin ini.⁵ Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir-abad kedua puluh, sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan Distorsi dan *High Cost*. Prinsip yang paling pokok dari neoliberalisme adalah pasar dan perdagangan bebas atau jika berbicara dalam skala yang lebih besar, Neoliberalisme adalah usaha dalam mencari cara bagaimana memindahkan aset ekonomi negara menjadi kepemilikan pribadi atau swasta.

Di Indonesia, Jejak neoliberalisme di Indonesia dapat ditelusuri ketika Indonesia mulai memasuki era pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak Bulan Maret 1966. Orientasi pemerintahan Orba sangat bertolak belakang dengan era sebelumnya. Kebijakan Orba lebih berpihak kepada Barat dan menjauhi ideologi komunis.

Dengan membaiknya politik Indonesia dengan negara-negara Barat, maka arus modal asing mulai masuk ke Indonesia, khususnya PMA dan hutang luar negeri mulai meningkat. Menjelang awal tahun 1970-an atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu

⁵ <http://www.erasuslim.com/berita/dunia/indonesia-negeri-penganut-neoliberalisme.htm>

konsorsium *Inter-Government Group on Indonesia* (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju termasuk Jepang untuk membeayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya dari sosialisme lebih ke arah *semikapitalisme*.

Di Indonesia, paham neoliberal mulai terasa pengaruhnya di tahun 1980-an, ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dan ekonomi, yang berujud dalam berbagai paket deregulasi semenjak tahun 1983. Paralel dengan masa itu adalah terjadinya krisis hutang dunia Ketiga di tahun 1982, ketika Mexico default. Setelah itu Bank Dunia dan IMF masuk ke dalam perekonomian negara-negara yang terkena krisis hutang lewat perangkat SAP. Saat itu terutama di negara-negara Amerika Latin dan Afrika Indonesia belumlah terkena krisis, dan karenanya jauh dari hiruk-pikuk SAP. Akan tetapi sejak itu jelas pola pembangunan Indonesia mulai mengadopsi kebijakan neo-liberal, khususnya karena keterikatan Indonesia kepada IGGI, Bank Dunia dan IMF. Beberapa kebijakan pada saat itu, yang membuat Indonesia semakin terbuka kepada kapitalisme global, secara ringkasnya adalah sebagai berikut:⁶

1. Di bidang moneter dan keuangan:

Pada bulan Maret 1983, dilakukan devaluasi terhadap rupiah sebesar 28%. Kemudian sejak Juni 1983, dimulai deregulasi perbankan dengan menghapus kontrol

⁶ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP-AMN-YKPN, Yogya, 1987, hlm.374-376; Panji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm 157-175.

atas suku bunga dan pagu kredit. Di bulan Oktober 1986, pemerintah menghapus pagu swap pada BI. Tanggal 12 September 1986, dilakukan kembali devaluasi atas rupiah sebesar 31%. Setelahnya, tanggal 27 Oktober 1988 (terkenal dengan Pakto—paket Oktober) pemerintah memberi keleluasaan untuk pendirian bank baru, termasuk bank patungan, dengan menurunkan *reserve requirement* dari 15% menjadi 2%, dan memperlakukan peraturan *lending limit*. Pada Desember 1987, pemerintah memperbaiki fungsi pasar modal Jakarta dan dibentuknya pasar paralel. Selanjutnya di bulan Desember 1988, diadakan deregulasi pasar modal dan jasa finansial. Tanggal 25 Maret 1989, *follow-up* Pakto 1988.

2. Di bidang fiskal:

Di tahun 1984, dimulai reformasi perpajakan dengan pengenaan PPh (pajak penghasilan). Tahun 1985, diperkenalkan pajak pertambahan nilai. Tahun 1986, digantinya IPEDA dengan pajak bumi dan bangunan (PBB)

3. Di bidang perdagangan

Pada bulan Maret 1985, diadakan pengurangan tarif dari 0-225% tinggal menjadi 0-60%. Selanjutnya dikeluarkan Inpres no. 4/1985 yang mengganti peran bea cukai oleh SGS dari Swiss. Bulan Mei 1986 (dikenal dengan Pakem) dilakukan perbaikan *duty drawback* dan upaya agar eksportir mendapatkan input dengan harga internasional. Pada bulan Oktober 1986, dilakukan perubahan dari lisensi impor menjadi impor umum, penghapusan *non-trade barrier* (NTB) dan penurunan tarif

lebih lanjut. Bulan Januari 1987, kembali beberapa perubahan lisensi impor menjadi impor umum. Selanjutnya Juli 1987, dilakukan simplifikasi kuota tekstil. Pada bulan Desember 1987, diadakan deregulasi lebih lanjut tentang sistem impor dan ekspor serta investasi bagi asing. Di bulan November 1988, penghapusan monopoli impor (plastik dan baja) dan deregulasi angkutan laut antar pulau. Pada Januari 1989, diperkenalkan '*Harmonized System of Trade Classification*'. Kemudian pada Mei 1990, dilakukan penghapusan NTB lebih lanjut menjadi tarif, deregulasi farmasi dan peternakan.

4. Di bidang investasi:⁷

Pada bulan Mei 1986, 95% kepemilikan asing dimungkinkan untuk melakukan investasi berorientasi ekspor. Perusahaan yang berorientasi ekspor diizinkan mendistribusikan produknya di dalam negeri dan perusahaan patungan dapat memperoleh kredit ekspor dari pemerintah. Kemudian tanggal 23 Oktober 1993 dikeluarkan Pakto 1993, yaitu paket deregulasi sektor riil, diantaranya izin investasi langsung dapat diurus di tingkat kabupaten dan kotamadya dan penghapusan berbagai surat dan persetujuan. Setelahnya dikeluarkan PP 20/1994 tanggal 2 Juni 1994, yang sangat liberal, yaitu dibolehkannya kepemilikan modal asing sampai dengan 95-100%, termasuk penguasaan atas sarana hajat hidup orang banyak, seperti pelabuhan, tenaga listrik, kereta api, pembangkit tenaga nuklir dan media massa.. Oleh karenanya dapat dikatakan memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an sistem ekonomi di

⁷ ibid

Indonesia terus mengalami pergeseran. Menilik kebijakan yang banyak ditempuh pemerintah kita, kita dapat menilai bahwa ada sebuah *mainstream* sistem ekonomi telah dipilih atau telah 'dipaksakan' kepada negara kita. Isu-isu ekonomi politik banyak dibawa ke arah libelarisasi ekonomi, baik libelarisasi sektor keuangan, sektor industri maupun sektor perdagangan. Sektor swasta diharapkan berperan lebih besar karena pemerintah dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi (baik yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam maupun hutang luar negeri).

Pakto '88 dapat dianggap sebagai titik tonggak kebijakan libelarisasi ekonomi di Indonesia. Menjamurnya industri perbankan di Indonesia, yang selanjutnya diikuti dengan terjadinya transaksi hutang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta yang sangat pesat, mewarnai percaturan ekonomi Indonesia saat itu.

Masa pembangunan ekonomi Orde Baru-pun akhirnya berakhir. Puncak dari kegagalan dari pembangunan ekonomi Orba ditandai dengan meledaknya krisis moneter, yang diikuti dengan ambruknya seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia.⁸

Upaya pemilihan perekonomian dari krisis 1997 pun pada akhirnya berujung kepada harus (semakin) dijalankannya agenda neoliberalisme di Indonesia. Neoliberalisme adalah konsep paling mutakhir dari kapitalisme, dan dominasi agendanya harus difahami dalam konteks sejarah kapitalisme. Dalam kasus

⁸ Dalam makalah Dwi Condro Triono "menghadapi hegemoni neoliberalisme di indonesia"

Indonesia, kapitalisme dahulu pernah mengambil bentuk penjajahan fisik (kolonialisme). Sebagaimana perkembangannya di seluruh dunia, agenda neoliberalisme di Indonesia hanya merupakan suatu tahap saja dari kapitalisme. Neoliberalisme adalah konsep paling mutakhir dari kapitalisme, dalam arti yang mendominasi perwujudannya saat ini. Sebagai suatu aliran pemikiran, neoliberalisme memiliki akar pada gagasan kapitalisme yang awal. Sebagai suatu agenda (terutama dalam mekanisme dan sistem ekonomi), neoliberalisme baru dominan sekitar dua dekade terakhir ini.⁹

Secara umum, pemerintah menyatakan bahwa program pembangunan yang dilakukan sudah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Akan tetapi jika ada pernyataan bahwa pemerintah sudah berhasil mengapa lapangan pekerjaan masih susah, rakyat masih harus antri beras, harga kebutuhan pokok di tahun 2011 ini semakin meningkat sehingga sebagian rakyat tidak mampu membelinya.

Pasca krisis moneter, memasuki era reformasi sampai sekarang ini, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya. Bahkan semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, Indonesia benar-benar telah menuju liberalisasi ekonomi. Hal itu paling tidak dapat diukur dari beberapa indikator utama, yaitu:

⁹ Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, *Neoliberalisme mencengkrum Indonesia*, Jakarta: E Publishing Company. 2008 hal 23

1. Dihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap. Berarti, harga dari barang-barang strategis yang selama ini penentuannya ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya secara berangsur diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.
2. Nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (*floating rate*). Sesuai dengan kesepakatan dalam *LoI* dengan pihak IMF, penentuan nilai kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap (*fix rate*). Dengan kata lain, besarnya nilai kurs rupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar.
3. Privatisasi BUMN. Salah satu ciri ekonomi yang liberal adalah semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk didalamnya adalah kepemilikan asset-asset produksi. Dengan “dijualnya” BUMN kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing, berarti perekonomian Indonesia semakin liberal.
4. Peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT. Dengan masuknya Indonesia dalam tata perdagangan dunia tersebut, semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk “kubangan” libelarisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global.¹⁰

Konteks zaman sekarang Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II), yang gencar saat ini adalah “pembatasan pemakaian BBM bersubsidi” alih-alih negara mengalami kerugian dan dengan larangan penggunaan BBM bersubsidi tahun 2011

¹⁰,Dalam Makalah Dwi Condro Triono dengan tema “Islam dan Tantangan Ekonomi Global”

nanti, pemerintah berharap bisa menghemat 14 juta kiloliter dari target BBM bersubsidi 38,5 juta kiloliter atau Rp 28 triliun. Padahal dari hasil audit terhadap BBM bersubsidi sejak rencana kuota BBM bersubsidi oleh pemerintah pada tahun 2009 hingga 2011, ditemukan koreksi yang dapat menghemat subsidi hingga Rp 18,3 triliun. Koreksi ini lebih tinggi dari rencana pemerintah untuk menghemat 2,3 juta KL senilai Rp 4,8 Trilyun. Jadi, memang belum ada alasan yang tepat untuk pemerintah membatasi atau menaikkan harga BBM bersubsidi. Yang kemudian jadi pertanyaan, kenapa pemerintah ngotot membatasi BBM bersubsidi atau menaikkan harga premium? Menurut Ichsanuddin Noorsy” ini kebijakannya yang konsisten memenuhi perintah asing. Hal ini juga diungkapkan oleh Hidayatullah Mutaqien, mengungkapkan bahwa “pemerintahan yang lepas tanggung jawab dari pemenuhan kebutuhan rakyat dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Akibatnya pola hubungan antara pemerintah dengan rakyat seperti hubungan pedagang dan pembeli. Inilah inti dari neoliberalisme.¹¹

Kebijakan para ekonom-ekonom neoliberal yang menjadikan Indonesia menjadi negara penghamba dan penghutang yang pada gilirannya memiskinkan rakyat Indonesia. Ekonom salah satunya yang berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada adalah Boediono yang kini menjadi wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Neoliberalisme adalah kata lain untuk *neokolonialisme*, yaitu penjajahan bentuk baru lewat hutang yang “dipaksakan” oleh lembaga-lembaga

¹¹ Tabloid media umat, edisi 49, 11 Muharram-1 Shafar 1432 H/ 17 Desember 2010 – 6 Januari 2011

“dunia” yang sebenarnya mewakili *kartel perbankan AS* (“internasional”). Bahkan dikatakan oleh Fuad Bawazier “Presiden hanya boneka ekonomi karena cengkeraman kepentingan AS melalui tangan *IMF, World Bank* dan *WTO*. Di Indonesia tangan-tangan AS itu diwakili oleh mereka yang diistilahkan *Mafia Berkeley*”.¹² Mafia Berkeley adalah nama yang sudah membaku sebagai label atau trade mark untuk sekelompok *ekonom dengan mazhab pikiran kapitalisme* yang dianutnya secara konsisten dan militan. Umumnya mereka adalah para alumni dari Universitas Berkeley di California. Meski sekarang anggota mafia ini tidak harus lulusan Berkeley. Asal ekonom itu ‘setia’ dalam menjalankan kebijakan-kebijakan *Washington Consesus*, mereka dinamakan juga sebagai anggota Mafia Berkeley.

Di Indonesia, hanya sebagian kecil elemen rakyat yang berani melakukan kritik terhadap praktek neoliberalisme di Indonesia. Kritik terhadap neoliberalisme seringkali ditutup-tutupi baik oleh kalangan akademisi, birokrat, politisi maupun media massa. Satu diantara sekian banyak gerakan yang muncul kepermukaan dan cenderung mendominasi gerakan islam kontemporer adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir dalam rangka sebagai penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa, Muhammadiyah ini juga organisasi da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai representasi dari umat Islam Indonesia, Muhammadiyah perlu mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan neoliberalisme karena telah terbukti

¹² <http://moendg07.wordpress.com/2009/05/13/antara-sby-budiono-dan-kepentingan-neoliberalisme-as-di-indonesia/>

tidak mensejahterakan rakyat malah menyengsarakan rakyat. Inilah alasan mengapa peneliti mengambil tentang neoliberalisme dalam persepsi Muhammadiyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah persepsi politik Muhammadiyah terhadap Neoliberalisme di Indonesia pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ?

C. Batasan Permasalahan

Penelitian ini dibatasi pada penjelasan bagaimana persepsi Muhammadiyah secara umum tentang kebijakan neoliberalisme selama pemerintahan SBY-Budiono. Studi akan dilakukan pada Muhammadiyah di Yogyakarta, karena Muhammadiyah memiliki historis dan perkembangan yang pesat di Yogyakarta dan juga pertimbangan Yogyakarta sebagai ibukota propinsi DIY sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan pariwisata.

D. Tujuan Penelitian

Setiap aktifitas penelitian tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh para peneliti. Tujuan Penelitian setidaknya dapat diketahui dari rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti.

Dengan melihat rumusan masalah tersebut diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Peneliti ingin mengetahui persepsi politik Muhammadiyah terhadap neoliberalisme di Indonesia pada masa pemerintahan SBY-Budiono.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain jawaban dari tujuan penelitian yaitu, pembaca mengetahui persepsi politik Muhammadiyah terhadap neoliberalisme di Indonesia khususnya pada masa pemerintahan SBY-Budiono dan juga diharapkan kedepannya ada kajian yang lebih mendalam dalam meneliti Neoliberalisme yang saat ini gencar dilakukan oleh Pemerintah

Adapun kegunaan teoritis berkaitan dengan skripsi yang diambil penulis dalam jurusan ilmu pemerintahan adalah dapat mengetahui pemikiran dan ideologi politik suatu organisasi disini adalah Muhammadiyah yang kemudian penulis kaitkan dengan sosiologi Politik Islam, Dinamika Politik dan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah penulis dapatkan selama masa kuliah.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Persepsi Politik

a. Persepsi

Persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal dari pancainderanya.¹³ Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau

¹³ B.N. Marbun, *kamus politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007 hal 383

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli). Persepsi berbeda dengan sensasi. Sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolik, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Sensasi merupakan bagian dari persepsi. Meski demikian, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori.¹⁴

Persepsi ditentukan oleh faktor personal (fungsional) dan situasional (structural). Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk yang disebut dengan faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karena karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli itu. Adapun faktor-faktor structural yang menentukan persepsi berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Menurut teori Gestalt, jika kita mempersepsikan sesuatu, kita tidak meneliti fakta-fakta yang terpisah, melainkan harus memandangnya secara keseluruhan.¹⁵

b. Politik

Kalau kita berbicara mengenai politik maka akan ditemukan berbagai macam pengertian karena berbagai pengamat menyoroiti politik dilihat dari sudut

¹⁴ Jalaluudin Rakhmat, *Islam Alternatif*, Mizan, Bandung, 1994

¹⁵ Ibid.

pandang dan unsur yang berbeda. Politik adalah ilmu kenegaraan/tata negara, sebagai kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.¹⁶ Politik adalah Berbagai kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses untuk menentukan tujuan negara dan melaksanakan tujuan itu. Untuk menentukan dan melaksanakan tujuan diperlukan decision making dalam bentuk public policy yang menyangkut proses distribusi dan alokasi sumber-sumber (kekuasaan) yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dibutuhkan power dan authority, baik untuk membangun kerjasama atau menyelesaikan konflik, dengan cara persuasif atau coercion. Politik mencakup public goals not private goals.¹⁷

Dalam pandangan Ilmuwan Islam mengenai politik. Kata politik itu berasal dari Bahasa Arab yaitu *As-siyasah* yang artinya (mengatur atau memimpin).¹⁸ Secara istilah bermakna mengatur urusan rakyat (umat) baik ke dalam maupun ke luar (negara). Negara adalah institusi yang mengatur politik secara praktis, sedangkan umat melakukan koreksi terhadap negara dalam melakukan tugasnya

Dalam pandangan Barat mengenai politik dinyatakan bahwa Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani dan diambil alih oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada jaman klasik Yunani, negara atau lebih tepat negara-kota disebut "polis". Plato (kurang lebih 347 sebelum Masehi) menamakan bukunya tentang

¹⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya : Arkola. 1994, hal 608

¹⁷ Powerpoint Mata Kuliah Pemikiran Politik oleh Bpk Suswanta

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Meluruskan dikotomi agama dan politik (Bantahan tuntas terhadap sekularisme dan liberalisme)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar hal 210-212. Terjemahan Khoirul Amru Harahap. 2008. Hal 19

soal-soal kenegaraan *Politeia*, dan muridnya bernama Aristoteles (kurang lebih 322 sebelum Masehi) menyebut karangannya tentang soal-soal *Politikon*. Maka “politik” memperoleh arti seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan.¹⁹ Dalam hal lain “*Politic : When we speak of politics, we mean of power. Politic is nicht anderes als der kamps um die Macht. Politic is who gets what, when and how.*”²⁰

c. Persepsi Politik

Persepsi politik adalah proses bagaimana seseorang atau kelompok menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti atas fenomena perpolitikan yang terjadi. Adapun pengertian lain dari persepsi politik adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan politik.

Persepsi Politik dipelajari sebagai fungsi dari sudut pandang politik perseptor itu. Politik sudut pandang didefinisikan dengan preferensi partai politik seseorang. Aspek yang berbeda dari persepsi partai politik adalah belajar tentang (a) posisi dirasakan para pihak pada kontinum Kiri-Kanan, (b) kesamaan persepsi antara para pihak, dan (c) jumlah dan sifat dimensi dan menyimpulkan yang mendasari persepsi dari kategori. Sehubungan dengan (a) dan (b), analisis menunjukkan perbedaan sistematis antara kelompok preferensi politik, sementara jumlah dan sifat dari dimensi politik tampaknya sama. Jadi, untuk kedua dimensi

¹⁹ B.N. Marbun, Op, Cit hal 396

²⁰ Powerpoint, Op. Cit

sosialis dan nonsosialists mendasari persepsi partai politik dapat ditafsirkan sebagai "kiri-kanan", "tungkai", dan "religiusitas."²¹

Seiring dengan perjalanan waktu, sistem ketatanegaraan dan politik yang dikembangkan dan juga ide-ide politik berkembang di tengah-tengah kehidupan sosial-politik kemasyarakatan, diinput oleh partai-partai politik melalui wakil-wakilnya di Eksekutif dan Legislatif, lalu diintegrasikan dan output nya adalah berupa undang-undang. Inilah letak urgensinya yang menyebabkan timbulnya persepsi dari individu maupun kelompok. Peran Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam perpolitikan kenyataannya tidak selalu mampu mengerjakan fungsi dan tanggung jawabnya yang konon katanya sebagai "wakil rakyat". Oleh karena kedepannya pasti timbullah persepsi politik masing-masing orang atau kelompok yang menilai kinerjanya apakah sudah sesuai dengan norma/kaidah. Oleh karena itu, dengan fenomena politik memberikan individu maupun kelompok mendeskripsikan ataupun ketepatan analisis terhadap kejadian politik.

2. Neoliberalisme

a. Makna Neoliberalisme

Secara umum, neoliberalisme dapat dipahami sebagai cara-cara untuk mengusahakan agar perdagangan antar bangsa menjadi lebih mudah. Dalam arti, mengusahakan agar barang-barang, sumber daya dan perusahaan-perusahaan

²¹ Bo Ekehammar & Jim Sidanius, *Political perception and political preference An exploratory study of Swedish political parties*, 2008. www.pressherald.com/.../political-perception-reality-clash_2011-02-18.html

lebih bebas bergerak dalam upaya mendapatkan sumber daya yang lebih mudah, untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi.

Tahun 1776, ketika buku Adam Smith yang berjudul "*The Wealth of Nations*" terbit, dunia menyambutnya dengan gegap gempita. Dengan kekuatan logika-logika ekonominya, Smith mampu meyakinkan dunia, bahwa tidak akan lama lagi tatanan ekonomi yang berkeadilan, yang akan menyejahterakan seluruh lapisan manusia akan segera terwujud. Si "tangan ajaib" (*the invisible hands*) akan mengatur semuanya. Dengan "tangan sakti" itu pula, ekonomi dijamin akan dapat tumbuh dengan sangat mengesankan. Yang penting menurut Smith, negara *nggak usah repot*. Negara tidak perlu ikut campur tangan dalam urusan ekonomi. Mekanisme pasar bebas akan dapat menyelesaikan semuanya (Deliarnov, 1997). Apakah ramuan Smith ini benar-benar mujarab?

Sejarah telah mencatat, apa yang diomongkan Smith memang bukan pepesan kosong. Ekonomi negara-negara Barat selama periode 150-an tahun telah mencatat pertumbuhan ekonomi dengan sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut juga diiringi dengan tingkat harga-harga yang bergerak relatif stabil (Boediono, 1999). Sebuah prestasi yang sangat menyilaukan. Ekonomi model ini kemudian dikenal dengan ekonomi liberalisme atau ekonomi kapitalisme. Apakah kondisi tersebut dapat berlangsung dan akan terus berlangsung?

Resep Smith dan para penerusnya ternyata harus berakhir dengan malapetaka besar. Tahun 1930-an ekonomi dunia mengalami depresi berat. Pertumbuhan

ekonomi *mandeg* total. Pengangguran merajalela dimana-mana. Para pakar ekonomi ketika itu mengalami kebingungan yang luar biasa. Bagaimana mungkin bencana itu bisa terjadi?

Ternyata, dunia ekonomi tidak harus menunggu untuk bingung terlalu lama. John Maynard Keynes tampil sebagai “pembaharu ekonomi”. Dia mengupas habis kelemahan-kelemahan teori Smith dan para pengikutnya. Kemudian dia memberi satu resep yang cukup bertentangan dengan dogma sebelumnya, yaitu menyarankan agar negara turut campur secara langsung guna menyelamatkan keterpurukan ekonomi. Resep Keynes untuk memperbaiki ekonomi negara melalui kebijakan fiskalnya mulai menampakkan hasil. Akan tetapi, kemanjuran resep Keynes tidak bertahan lama (Deliarnov, 1997).

Seiring dengan maraknya pendukung-pendukung Keynes, pasca Perang Dunia Kedua, muncul kelompok yang idenya berseberangan dengan kelompoknya Keynes. Kelompok ini dikenal masih setia dengan ide-ide klasiknya Adam Smith. Mereka kemudian dijuluki sebagai kelompok Kanan Baru atau biasa disebut dengan neoliberalisme. Dalam usaha memenangkan pertarungan pemikirannya, kaum neoliberalisme terus-menerus melakukan penyerangan terhadap kebijakan-kebijakan yang bersandar pada Keynesian. Kelompok ini menyerang fondasi kebijakan Keynesian dengan mengambil momentum krisis ekonomi akibat inflasi yang tidak dapat diatasi oleh kebijakan Keynesian (Winarso, 2004).

Kaum neolibelarisme menyatakan, bahwa akibat terlalu banyaknya campur tangan negara, dunia terjebak dalam krisis yang berkepanjangan pada tahun 1970-an. Menurut mereka, peningkatan belanja publik Keynesian dianggap menciptakan terlalu banyak *demand*. Itulah yang menjadi penyebab timbulnya inflasi yang semakin meluas (Winarso, 2004).

Di level kebijakan, neoliberalisme mulai menunjukkan eksistensinya pada tahun 1979. Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher merupakan tokoh politik yang merevolusikan faham ini di Inggris. Untuk justifikasinya, ia menyerukan "*There Is No Aternatif*" (TINA). Sedangkan di Amerika, arsitek utamanya adalah Ronald Reagan (Budiantoro, 2005). Faham ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hasil kebijakan Thatcher dan Reagan memang membuahkan hasil. Kebijakannya mampu mengatasi krisis yang terjadi pada waktu itu, terutama dalam meningkatkan standar hidup, khususnya bagi AS dan Inggris.

Era pasca Reagan dan Thatcher, gagasan-gagasan neoliberal mulai merebak di lingkup lembaga-lebaga internasional. Melalui GATT/WTO, IMF dan Bank Dunia, faham neoliberal menjadi semakin dominan dalam usahanya menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi di seluruh dunia. Lembaga-lembaga ini menekankan arti pentingnya pasar bebas dunia dan berusaha memarginalkan peran negara dalam proses-proses ekonomi (Winarso, 2004).

Neoliberalisme juga lebih banyak dipandang sebagai konsep ekonomi pasar berdasarkan Konsensus Washington yang dirumuskan oleh John Williamson (1989). Konsensus Washington yang berisi 10 item liberalisasi ekonomi seperti

disiplin fiskal, deregulasi, privatisasi, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi, dan liberalisasi sektor finansial menjadi standar paket reformasi ekonomi yang ditawarkan.²²

Secara lebih spesifik, Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia menyebutkan ada 5 (lima) Nilai dasar dari Neoliberalisme, yaitu.²³

1. Aturan Pasar. Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga. Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.

2. Memotong pengeluaran publik dalam hal pelayanan sosial. Ini seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk 'jaring pengaman' untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih – ini juga guna mengurangi peran pemerintah. Di lain pihak mereka tidak menentang adanya subsidi dan manfaat pajak (tax benefits) untuk kalangan bisnis.

3. Deregulasi. Mengurangi peraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha.

4. Privatisasi. Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol,

²² <http://www.jurnal-ekonomi.org/2009/06/22/jejak-neoliberalisme-di-indonesia/>

²³ Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia, *What is Neo-Liberalism?*, Third World Resurgence No. 99/1998, hlm. 7-8.

listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.

5. Menghapus konsep barang-barang publik (public goods) atau komunitas. Menggantinya dengan “tanggungjawab individual”, yaitu menekankan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya.

Walaupun neoliberalisme selalu dikaitkan dengan ekonomi, namun sebenarnya neoliberalisme bukan hanya sekedar ekonomi. Neoliberalisme bervisi tentang manusia dan masyarakat dengan cara pikir ekonomi yang khas sebagai perangkat utama. Visi neoliberalisme tersebut dapat kita lihat dalam uraian berikut:

Pertama, Visi Antropologis²⁴

Neoliberalisme berkembang melalui reduksi manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo oeconomicus*). Yang menarik dari visi neoliberal adalah pengandaian manusia sebagai *homo oeconomicus* direntang luas untuk diterapkan pada semua dimensi hidup manusia: menjadi prinsip pengorganisasian seluruh masyarakat. Hal itu secara eksplisit diungkapkan Gary Becker dalam karyanya yang berjudul “*The Economic Approach to Human Behavior* (1976):

²⁴ B. Herry Priyono, Neoliberalisme, <http://www.duniaesai.com/filsafat/Fil44.htm>.

pendekatan ekonomi menyediakan kerangka semesta untuk memahami semua tingkah laku manusia.

Kedua, virtualisasi Ekonomi

Awal tahun 1980-an terjadi evolusi berpikir: perspektif *oeconomicus* tidak hanya direntang untuk diterapkan pada dimensi hidup manusia, tetapi dalam perspektif *oeconomicus* sendiri berkembang hierarki prioritas: sektor finansial (*financial capital*) atas sektor-sektor lain dalam ekonomi. Hasilnya adalah revolusi produk finansial, seperti derivatif, sekuritas, dan sebagainya. Tren ini lalu mempertajam perbedaan antara sektor virtual dan sektor riil dalam ekonomi dengan prioritas yang pertama. Jadi, proses ekonomi bergerak dengan prioritas transaksi uang ketimbang produksi barang/jasa riil.²⁵

Gagasan Filosofis (Konsep) Neoliberalisme

Pertama, menginginkan sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad ke-19

Kapitalisme abad ke-19 menghargai kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan pemerintah sangat sedikit dalam urusan kehidupan ekonomi. Yang menjadi penentu utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar bukan pemerintah. Gagasan ini barangkali masih dipengaruhi oleh gagasan John Locke (abad 18) yang mengatakan bahwa kaum liberal adalah orang-orang yang memiliki hak untuk hidup, merdeka, sejahtera, bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun. Pada zaman

²⁵ <http://postinus.wordpress.com/2008/03/04/apa-itu-neoliberalisme/>

kapitalisme abad ke-19 ini, orang bebas diartikan sebagai seseorang yang memiliki hak-hak dan mampu menggunakannya dengan memperkecil campur tangan pihak lain (aturan pihak lain): kita berhak menjalankan kehidupan sendiri.

Kedua, mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas: pasar yang berkuasa

Untuk mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas, kaum neoliberalisme selalu mengusung “kebebasan” dan tidak adanya hambatan buatan yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau tanpa hambatan perdagangan lainnya (tanpa regulasi legal). Bentuk-bentuk hambatan perdagangan yang ditolak kaum neoliberalisme (dalam perdagangan bebas): bea cukai, kuota, subsidi yang dihasilkan dari pajak sebagai bantuan pemerintah untuk produsen lokal, peraturan administrasi dan peraturan anti-dumping. Menurut kaum neoliberalisme pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah.

Ketiga, menolak (mengurangi) campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik

Gagasan ini terfokus pada metode pasar bebas, pembatasan campur tangan pemerintah yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Gagasan ini sebenarnya tidak sehat. Kaum kaya semakin kaya dan kaum miskin semakin miskin. Seharusnya yang lebih penting adalah keadilan perdagangan (*fair trade*) bukan perdagangan bebas (*free trade*).

Keempat, memangkas anggaran publik untuk layanan sosial

Kurangi anggaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, karena semuanya itu adalah bantuan dari pemerintah. Seandainya hal ini berkurang berarti peran pemerintah juga berkurang. **Kelima, deregulasi:** hambatan dan hukum perdagangan harus dihapus. **Keenam, privatisasi:** aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta (non-pemerintah). **Ketujuh, mengenyahkan konsep "the public good"** mengurangi tanggung jawab bersama dan menggantikannya dengan "kewajiban individu".²⁶

b. Sejarah Neoliberalisme

Sejarah Neo-Liberal bisa dirunut jauh ke masa-masa tahun 1930-an. Adalah Friedrich von Hayek (1899-1992) yang bisa disebut sebagai Bapak Neo-Liberal. Hayek terkenal juga dengan julukan ultra-liberal. Muridnya yang utama adalah Milton Friedman, pencetus monetarisme.

Pandangan Neo-Liberal dapat diamati dari pikiran Hayek. Bukunya yang terkenal adalah "*The Road to Serfdom*" (Jalan ke Perbudakan) yang menyerang keras Keynes. Buku tersebut kemudian menjadi kitab suci kaum kanan dan diterbitkan di *Reader's Digest* di tahun 1945. Ada kalimat di dalam buku tersebut: "Pada masa lalu, penundukan manusia kepada kekuatan impersonal pasar, merupakan jalan bagi berkembangnya peradaban, sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa itu. Dengan melalui ketertundukan itu maka kita bisa ikut serta setiap harinya dalam membangun sesuatu yang lebih besar dari apa yang belum

²⁶ Ibid.

seungguhnya kita pahami". Neo-liberal menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad-19, di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Regulator utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Mekanisme pasar akan diatur oleh persepsi individu, dan pengetahuan para individu akan dapat memecahkan kompleksitas dan ketidakpastian ekonomi, sehingga mekanisme pasar dapat menjadi alat juga untuk memecahkan masalah sosial. Menurut mereka, pengetahuan para individu untuk memecahkan persoalan masyarakat tidak perlu ditransmisikan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam arti ini maka Neo-liberal juga tidak percaya pada Serikat Buruh atau organisasi masyarakat lainnya.

Salah satu benteng neo-liberal adalah Universitas Chicago, di mana Hayek mengajar di situ antara tahun 1950 sampai 1961, dan Friedman menghabiskan seluruh karir akademisnya. Karena itu mereka juga terkenal sebagai "*Chicago School*". Buku Friedman adalah "*The Counter Revolution in Monetary Theory*" yang menurutnya telah dapat menyingkap hukum moneter yang telah diamatinya dalam berabad-abad dan dapat dibandingkan dengan hukum ilmu alam. Friedman percaya pada *freedom of choice* (kebebasan memilih) individual yang ekstrim. Dengan demikian, neo-Liberal tidak mempersoalkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Pertumbuhan konglomerasi dan bentuk-bentuk unit usaha besar lainnya semata-mata dianggap sebagai manifestasi dari kegiatan individu atas dasar kebebasan memilih dan persaingan bebas. Efek

sosial yang ditimbulkan oleh kekuasaan ekonomi pada segelintir kelompok kuat tidak dipersoalkan oleh neo-Liberal. Karenanya demokrasi ekonomi tidak ada di dalam agenda kaum neo-Liberal.²⁷

Pandangan kaum neo-Liberal pada dasarnya tidak populer di masyarakat Barat. Mereka anti terhadap welfare state (negara kesejahteraan) dan mereka juga anti demokrasi. Tetapi mengapa mereka bisa berjaya sekarang? Susan George menjawabnya, bahwa mereka berasal dari sebuah kelompok kecil rahasia dan mereka sangat percaya pada doktrin tersebut, yang kemudian dengan bantuan para penganannya, membangun jaringan yayasan-yayasan internasional yang besar, lembaga-lembaga, pusat-pusat riset, berbagai publikasi, para akademisi, para penulis, serta humas yang mengembangkan, mengemas dan mempromosikan ide dan doktrin tersebut tanpa henti. Kata Susan, “mereka membangun kader-kader ideologis yang luar biasa efisiennya karena mereka memahami apa yang disampaikan oleh pemikir marxis Itali Antonio Gramsci ketika ia berbicara tentang konsep hegemoni kultural. Bila kamu dapat menguasai kepala orang, maka hati dan tangan mereka akan ikut”.²⁸

3. Gerakan Massa

Eric Hoffer dalam bukunya *Gerakan Massa* menyebutkan bahwa agama merupakan salah satu faktor yang menjadi sumber bagi masyarakat untuk

²⁷ Sritua Arief, *Teori dan Kebijakan Pembangunan*, CIDES, 1998, hlm. 36-39

²⁸ Susan George, “A Short History of Neoliberalism”, dalam Walden Bello, Nicola Bullard, Kamal Malhotra (ed.), *Global Finance: New Thinking on Regulating Speculative Capital Markets*, Zed Books, 2000, hlm. 28-29.

membangkitkan kegairahan terhadap suatu kekecewaan yang ada pada sistem masyarakat yang berlaku yang dinilai telah gagal dalam kehidupan masyarakat. Kasus kebangkitan kaum Islami di Iran merupakan contoh konkret yang dapat diajukan disini. Di Indonesia sendiri gerakan pembebasan terhadap kaum penjajah umumnya dilandasi oleh semangat keagamaan dalam menggerakkan massa dalam melakukan perlawanan. Gerakan agama sebagai gerakan sosial ditandai dengan bangkitnya kerelaan para anggotanya untuk berkorban dan melakukan aksi secara kompak, antusias, harapan berapi-api dan ciri lain yang mencirikan kesetiaan pada gerakan tersebut. Selanjutnya dikatakan juga bahwa gerakan ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang termarginalisasi dari kehidupan masyarakat dan tidak puas serta kecewa terhadap keadaan yang ada di masyarakat.

Gerakan keagamaan yang sedang bergerak maju biasanya sibuk mengadakan perubahan dan terbuka terhadap berbagai pemikiran dan pandangan suatu teknik baru dalam strategi pergerakan mereka yang datang dari segala penjuru. Awal mulanya suatu gerakan keagamaan memang belum terbuka terhadap hal-hal yang datang dari luar mereka namun semakin ia mengalami perkembangan biasanya terjadi berbagai penyesuaian bahkan tak jarang terjadi transformasi pemikiran dan strategi pergerakan ketika gerakan tersebut harus memenuhi tuntutan realitas yang ada.

Semua gerakan massa menggunakan aksi-aksi yang digelar sebagai alat pemersatu yang menghilangkan ciri pribadi anggotanya secara halus. Kaum Nazi

Jerman selalu melakukan baris-berbaris yang panjang sebagai upaya membentuk satu kesatuan yang solid diantara para anggotanya. Mulanya kegiatan seperti ini dianggap sebagai suatu hal yang sia-sia. Namun Herman Rousching dalam bukunya "*The Revolution of Nihilisme*" di halaman 48 harus mengakui bahwa aksi baris-berbaris tersebut ternyata mampu membelokkan pikiran anggotanya dan baris berbaris membunuh pikiran serta memusnahkan ciri pribadi. Dalam tatanan pergerakan massa yang lebih kongkret, gerakan demokrasi, aksi-aksi massa demonstrasi dan lain sebagainya merupakan sebuah sarana yang cukup efektif untuk merapatkan barisan kader organisasi dan sebagai sarana yang lebih memperkenalkan dan memahami masing-masing anggota.²⁹

Aswab Mahassin mencoba memetakan anatomi gerakan sosial melalui tiga indikator yang paling tidak melalui ketiga indikator tersebut mampu diperoleh dan dianalogikan dan diperoleh profil sebuah gerakan sosial dengan beberapa ciri.

Ketiga indikator tersebut adalah:

a. Basis massa

Aswab Mahassin menyebutkan bahwa kebanyakan gerakan massa diprakarsai oleh golongan menengah sedangkan kelompok bawah seringkali menjadi objek dari sebuah gerakan yang dilakukan oleh kelompok menengah tersebut. Keberhasilan sebuah gerakan sosial dalam hal ini ditentukan oleh kualitas dan kuantitas dari gerakan tersebut. Indikator kualitas massa dalam

²⁹ Eric Hoffer, Gerakan Massa; yayasan obor Jakarta 1988: 120-121

gerakan, menurut *Gellner* ditentukan oleh tingkat kesadaran dan rasionalitas massa dari gerakan tersebut. Sedangkan dari kuantitas, George Simmel mengatakan bahwa kuantitas massa merupakan variabel yang sangat menentukan bagi sebuah kinerja gerakan massa dalam menjalankan roda pergerakan organisasi mereka.

b. Ideologi dan tema

Ideologi dan tema dari sebuah gerakan massa seringkali menjadikan kejayaan dan romantisme masa lalu sebagai motivator penggerak dan melahirkan sebuah energi pergerakan yang cukup kuat. Dalam kasus pergerakan agama, romantisme akan kejayaan dan kegemilangan zaman keemasan para nabi dan khalifah seringkali menjadi bahan acuan dari bahan bakar penyemangat motivasi yang sering digunakan.

c. Organisasi, strategi dan taktik yang digunakan

Suatu gerakan umumnya selalu memakai berbagai kegiatan seperti kelompok-kelompok diskusi, perkumpulan atau yayasan yang bergerak di bidang tertentu atau berbagai bentuk komunitas yang pada akhirnya meluas menjadi sebuah pergerakan. Gerakan yang dimaksud bisa berbagai bentuk, salah satunya adalah partai politik.

Strategi suatu pergerakan sangat erat terkait dengan situasi dan kondisi lingkungan dimana persoalan tersebut tumbuh dan berkembang, sehingga dengan demikian strategi sebuah organisasi tak dapat disamakan karena ia sangat terkait pada ruang dan waktu. Dalam satu waktu menurut Aswab

Mahassin, ketiadaan partai maupun gerakan yang cukup kuat bisa memunculkan taktik koalisi, aliansi atau yang sejenisnya sebagai manifestasi kesadaran posisi suatu gerakan yang belum memiliki basis yang kuat yang juga sebagai sarana berjuang yang dapat diterima dalam kondisi masyarakat yang plural dan kompleks.³⁰

Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas atau sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan jumlah pengikut yang besar, Islam kemudian memiliki pengaruh yang luas dalam kehidupan masyarakat dan negara di negeri ini. Proses sosial yang berlangsung terkadang juga menimbulkan pertarungan wacana untuk memperebutkan hegemoni Islam yang dipandang paling otentik. Proses ini pada gilirannya melahirkan organisasi keagamaan di kalangan umat Islam pada awal abad ke 20, seperti Muhammadiyah, Persis, NU, dan lain-lain. Munculnya gerakan di atas sebagai representasi gerakan Islam kontemporer di Indonesia, Munawir Sjadzali memberikan beberapa alasan melatarbelakangi pemikiran politik Islam pada abad ke 19 tersebut. Pertama, kemunduran dunia Islam yang mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan pembaharuan keagamaan. Kedua, dominasi kekuasaan Barat terhadap sebagian yang sebagian besar dunia Islam yang berakibat rusaknya hubungan antara Islam dan Barat dan menimbulkan rasa

³⁰ Aswab Mahassin. *Pola Gerakan Pinggiran*. Dalam *Prisma* No. 7 Tahun XVIII.1989. Jakarta. LP3ES. halaman 4

permusuhan serta sikap anti Barat. Ketiga, keunggulan peradaban Barat dalam bidang ilmu dan teknologi.³¹

4. Organisasi massa

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.³²

Dalam Al-Qur'an disebutkan pengertian mengenai organisasi yang artinya sebagai berikut:

"(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu memeluk Islam), memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)

Dan ada pula beberapa ahli yang mengemukakan pengertian organisasi yaitu diantaranya James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.³³ Dan juga Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat

³¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press. 1990 halaman 111

³² Keith Davis, *Human Relations at Work*, (New York, San Francisco, Toronto, London: 1962).Hlm.15-19

³³ Ratna Wilis. 1996. *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.Hlm. 56

diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.³⁴

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi. Sedangkan Misi pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.³⁵

Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-

³⁴ Stephen P. Robbins. Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi, (Jakarta: Arcan: 1994), hal.4

³⁵ <http://islam-download.net/contoh-contoh/contoh-visi-misi-organnisasi.html>

anggotanya sehingga menekan angka pengangguran. Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.³⁶

Dalam berorganisasi setiap individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung kepada organisasi yang mereka pilih. Agar dapat berinteraksi secara efektif setiap individu bisa berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan. Dengan berpartisipasi setiap individu dapat lebih mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan.

Pada dasarnya partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan. Keterlibatan aktif dalam berpartisipasi, bukan hanya berarti keterlibatan jasmaniah semata. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.³⁷

³⁶ Keith Davis, Op. Cit hal 15-19

³⁷ Ibid.

Menurut Keith Davis ada tiga unsur penting partisipasi³⁸:

1. Unsur pertama, bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Hal ini diakui sebagai anggota artinya ada rasa "sense of belongingness".

Agar suatu partisipasi dalam organisasi dapat berjalan dengan efektif, membutuhkan persyaratan-persyaratan yang mutlak yaitu .

- Waktu. Untuk dapat berpartisipasi diperlukan waktu. Waktu yang dimaksudkan disini adalah untuk memahamai pesan yang disampaikan oleh pemimpin. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta.
- Bilamana dalam kegiatan partisipasi ini diperlukan dana perangsang, hendaknya dibatasi seperlunya agar tidak menimbulkan kesan "memanjakan", yang akan menimbulkan efek negatif.

³⁸ Ibid.

- Subyek partisipasi hendaknya relevan atau berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya.
- Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, dalam arti kata yang bersangkutan memiliki luas lingkup pemikiran dan pengalaman yang sama dengan komunikator, dan kalupun belum ada, maka unsur-unsur itu ditumbuhkan oleh komunikator.
- Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, misalnya menggunakan bahasa yang sama atau yang sama-sama dipahami, sehingga tercipta pertukaran pikiran yang efektif atau berhasil.
- Para pihak yang bersangkutan bebas di dalam melaksanakan peran serta tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan hendaknya didasarkan kepada kebebasan dalam kelompok, artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan dalam pikiran atau jiwa pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan kepada prinsip bahwa partisipasi adalah bersifat persuasif.³⁹

Di Indonesia terdapat banyak organisasi massa, Organisasi massa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk

³⁹ Ibid

berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial. Berdasarkan Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Definisi organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam Pasal 1: Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa Muhammadiyah termasuk dalam organisasi sosial kemasyarakatan bahkan keagamaan karena Pertama, keinginan untuk melakukan pemurnian agama.. Kedua, ingin mendobrak kemapanan dalam beragama terutama dalam rangka memahami ajaran Islam. Oleh karena itu, para pengikutnya didorong uantuk menggali ajaran Islam secara bebas tanpa harus terpaku terhadap pendapat ulama yang lebih senior. Ketiga, gerakan Islam tersebut berkeinginan menciptakan masyarakat ideal, yaitu masyarakat yang diatur dengan Islam sebagai aqidah dan syariat yang mencakup semua aspek kehidupan.

5. Hubungan Neoliberalisme dengan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

Neoliberalisme adalah paham yang mengutamakan pasar dan perdagangan bebas atau jika berbicara dalam skala yang lebih besar, Neoliberalisme adalah usaha dalam mencari cara bagaimana memindahkan aset ekonomi negara menjadi kepemilikan pribadi atau swasta. Adapun kaitan dengan KIB Jilid II bahwa

ternyata pemerintahan saat ini berusaha untuk mengutamakan pasar dan perdagangan serta memindahkan sumber kekayaan alam Indonesia di pegang oleh swasta terlebih lagi kepada asing.

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II bentukan SBY hanya akan berganti “casing” saja. Wajah-wajah neoliberal masih banyak yang bercokol di dalamnya. Jadi jangan heran bila ternyata kabinet baru ini hanya akan melanjutkan neoliberalisme. Agenda-agenda neolib lainnya juga akan tetap berlanjut, seperti penjualan BUMN. Program privatisasi BUMN yang “gagal” pada tahun 2009, bisa dipastikan akan dilanjutkan. Saat ini saja, pemerintah tengah bersiap-siap akan melepaskan Pertamina.

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera meminta jadwal pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan izin privatisasi beberapa perusahaan plat merah. Perusahaan negara yang saat ini masih butuh restu DPR dalam melakukan privatisasinya adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV dan VII. Sementara perusahaan plat merah yang sudah siap masuk lantai bursa antara lain: PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Sementara privatisasi PT Adhi Karya Tbk (ADHI) akan dilakukan melalui penerbitan saham baru (*rights issue*).⁴⁰

⁴⁰ www.detik.com

G. Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional merupakan suatu pengertian dari segala yang menjadi hal pokok perhatian. Definisi Konsepsional adalah suatu abstraksi dari kerangka dasar teori. Oleh karena itu dapat dijelaskan definisi Konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun definisi konsepsional dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Politik adalah proses bagaimana seseorang atau kelompok memberikan pandangan gambaran keseluruhan yang berarti atas fenomena perpolitikan yang terjadi.
2. Neoliberalisme adalah paham yang mengutamakan pasar dan perdagangan bebas atau jika berbicara dalam skala yang lebih besar, Neoliberalisme adalah usaha dalam mencari cara bagaimana memindahkan aset ekonomi negara menjadi kepemilikan pribadi atau swasta.
3. Gerakan Sosial adalah suatu badan yang terdiri dari sekelompok orang yang memiliki ideologi yang sama untuk mewujudkan visi, misi, strategi atau taktik dari badan atau organisasi tersebut.
4. Organisasi Massa adalah suatu istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial.

H. Definisi Operasional

Menurut Koentjaraningrat (1999) yang dimaksud dengan definisi operasional adalah “usaha untuk mengubah konsep-konsep yang berupa construct dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain”⁴¹. Adapun menurut Saifudin Anwar, Definisi Operasional adalah batasan atau definisi suatu variable agar tidak terjadi ambigu yaitu memiliki makna ganda dan tidak jelas.⁴² Definisi Operasional yang penulis gunakan untuk melihat Neoliberalisme di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Muhammadiyah dalam menyeleksi arus informasi terkait neoliberalisme pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II
2. Bagaimana Muhammadiyah dalam mengatur arus informasi terkait neoliberalisme pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II
3. Bagaimana Muhammadiyah dalam menginterpretasi arus informasi terkait neoliberalisme pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

I. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah, metode merupakan unsur yang sangat penting, karena metode adalah upaya ilmiah menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengolah obyek menjadi sasaran ilmu yang sedang diselidiki.

⁴¹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hal 75

⁴² Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, 2003, hal 72

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena mengutamakan kualitas analisis serta interpretasi data bukan menggunakan data-data statistik. Metode Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴³

Studi ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana penyusun bermaksud menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif diadakan untuk menggambarkan realitas sosial sedemikian rupa.⁴⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu data primer maupun data sekunder.

- a. Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, asli baik berbentuk dokumen ataupun berupa peninggalan lain. Atau data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, baik mendukung maupun yang melemahkannya dan data tersebut berkaitan erat dengan variabel pokok.⁴⁵ Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama. Data tersebut diperoleh baik dari wawancara dengan

⁴³ Jerome Kirk dan MacMiller, *Reliability and Validity Research*. Dalam Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1989. halaman 2-3

⁴⁴ Lexy J Maleong, *op.cit.* halaman 3

⁴⁵ Taliziduhu Ndraha, *Research teori, metodologi, administrasi*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1981

pengurus atau anggota Muhammadiyah maupun dari dokumentasi hasil rapat atau catatan harian. Sumber yang akan diwawancarai adalah Dr Zuly Qodir, Dr H. Haedar Nashir dan Ahmad Ma'ruf.

- b. Sumber sekunder adalah data yang melengkapi data primer, mendukung data primer maupun mendukung proyek penelitian.⁴⁶ Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua atau tidak langsung. Data tersebut bisa berasal dari buku, majalah, tabloid, jurnal, artikel atau referensi lain tentang Muhammadiyah, dan neoliberalisme.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, penyusun menggunakan cara :

- a. Interview

Interview berasal dari dua kata yaitu *inter* dan *view*. Secara leksikografi berarti saling melihat atau saling bertukar pikiran. Interview adalah teknik menggali, menemukan atau menjaring informasi atau pendapat secara langsung dengan jalan berkomunikasi dengan memakai bahasa.⁴⁷ Atau bisa juga diartikan sebagai usaha mendapatkan informasi melalui wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan karena penulis ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai pandangan politik Muhammadiyah terhadap neoliberalisme di Indonesia.

⁴⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1998

⁴⁷ Taliziduhu Ndraha, *Op.Cit*

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, majalah, jurnal, kolom dalam media massa yang bermanfaat untuk melengkapi informasi terhadap penelitian tentang pandangan politik Muhammadiyah terhadap neoliberalisme di Indonesia.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yaitu memahami makna dari suatu ucapan, statemen atau tindakan sesuai dengan konteks. Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa tahapan analisa seperti yang umum yaitu proses pengumpulan data, kemudian memulai dan menganalisa data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Ada berbagai cara untuk menganalisis data, tetapi secara garis besar penelitian ini mengikuti prosedur dan langkah-langkah berikut:⁴⁸ (a) reduksi data; (b) *display data* dan (c) pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Reduksi data dilakukan dengan cara menulis ataupun mengetik data yang diperoleh dari lapangan dengan rapi, terperinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Setelah reduksi data akan dilakukan *display data* dimana data yang telah direduksi disajikan untuk membantu dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi.

⁴⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, cet ke-5. 2004. Halaman 86